

BAB III

REAKSI PEREMPUAN DESA NOGOSARI TERHADAP PG.SEMBORO

3.1 Penangkapan ahli waris yang bersengketa

Penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan, dari Polres Jember tidak menyurutkan niat warga Nogosari yang lain untuk mengambil kembali lahan yang telah dikuasai oleh PT. Semboro PTPN XI.

Penangkapan ahli waris dipicu oleh, sebagian ahli waris yang berniat untuk menduduki tanah yang jadi sengketa itu secara paksa tanah yang disengketakan pada tebangan tebu yang terjadi pada bulan Juni sampai September. Bulan Desember berhasil diduduki ahli waris walau hanya sebagian dari luas keseluruhan yang mencapai \pm 100ha. Tanah tersebut oleh ahli waris ditanami pisang, agar PG. Semboro tidak bisa menanam tebu di area itu. Sampai pada bulan februari tidak ada tindakan dari PG. Semboro PTPN XI terhadap tanah yang dikuasai oleh ahli waris, sehingga tanah itu ditanami jagung, kedelai, dan kacang tanah. tanggal 22 mei 2001, selasa pagi ahli waris sebanyak 700 orang berkumpul di area perkebunan dengan membawa senjata tajam karena ada berita akan ada pengrusakan tanaman jagung, pisang, kedelai, dan kacang tanah yang sudah ditanam oleh ahli waris. Kemudian pagi itu juga ada empat mobil truk yang mengangkut orang-orang Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN XI. Orang-orang SP BUN PG. Semboro PTPN XI mengancam beberapa warga yang sedang ada di lahan dan merusak tiga hektar tanaman jagung dan pisang, orang-orang dari SP BUN PTPN XI membawa berbagai macam senjata tajam seperti celurit, pedang,

dan *wadung*. Ahli waris yang ada di lokasi kejadian sangat marah karena tanaman mereka dirusak, bentrokan hamper saja terjadi tapi karena massa dari SP BUN PTPN XI kalah banyak dari ahli waris yang berkumpul, orang-orang itu melarikan diri. Kemarahan massa ahli waris tanah Nogosari dilampiaskan dengan merusak kantor milik PTPN XI yang berada di Desa Nogosari, walaupun dijaga oleh satu pleto aparat keamanan dari polres jember, tetapi warga terus melakukan pengrusakan.

Sore harinya warga berjaga-jaga barangkali ada serangan balasan dari SP BUN PTPN XI, karena sebelum pengrusakan yang dilakukan oleh massa dari SP BUN PTPN XI ada pemberitahuan dari pihak PG. Semboro PTPN XI bahwa tanah yang ditanami warga akan ditebangi dan diganti dengan tanaman tebu milik PG. Semboro PTPN XI. Tetapi massa ahli waris mempertahankan tanah yang sudah ditanami itu sampai kapanpun.

Sebelum insiden yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2001, berkali-kali pekerja dari PG. Semboro PTPN XI datang untuk menanami tanah yang disengketakan dengan tanaman tebu, tetapi mereka dihadang oleh ahli waris yang dipimpin oleh Bakri, Dul, Musa, Ibu Op, Ibu Bakri, dan Ibu Sanah. Aparat keamanan dari Polres juga sering dihadang di Gumuk Bago sehingga sering kembali dan tidak jadi melakukan penanaman. Penjagaan terhadap tanah sengketa dilakukan oleh ahli waris supaya tidak ditanami tebu oleh PG. Semboro. Massa ahli waris bersenjata tajam untuk berjaga-jaga kalau ada masalah mendadak.

Setelah peristiwa pwngrusakan terhadap kantor milik PTPN XI, malam harinya beberapa tokoh ditangkap seperti Bakri dan Dul tokoh dari Gumuk Bago, dari Gumuk Limo, Pak Um, penangkapan itu dilakukan pada jam 00.00 WIB dini hari tanggal 23 Mei 2001, di rumahnya masing-masing. Aparat keamanan

membawa satu pleton pasukan untuk berjaga-jaga dan melakukan tembakan peringatan ke udara karena banyak warga ahli waris yang melihat peristiwa penangkapan itu, sehingga terjadi kekacauan. Tanggal 23 Mei 2001 terjadi juga penangkapan terhadap Musa, hari itu juga banyak ahli waris yang melarikan diri keluar dari Nogosari karena orang-orang ahli waris yang akan ditangkap menjadi bertambah.¹

3.2 Intimidasi dari Tokoh Formal maupun Informal

Penangkapan yang terjadi pada kawan-kawan seperjuangan ahli waris tanah di Nogosari merupakan pukulan yang teramat berat untuk perjuangan selanjutnya, karena semua yang ditangkap adalah tokoh-tokoh perjuangan kasus tanah yang ada di Nogosari. Padahal dalam organisasi tidak disiapkan pengganti dari tokoh-tokoh itu jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penangkapan tersebut.

Setelah penangkapan itu posisi seseorang yang ditokohkan menjadi kosong. Bu Op, Bu Bakri, dan Bu Sanah mencoba menggantikan posisi itu secara bersama. Perjuangan kaum perempuan di Nogosari banyak mendapat tentangan dari masyarakat yang tidak mau terganggu dan menganggap apa yang diperjuangkan oleh ahli waris adalah hal yang mengada-ada dan seenaknya sendiri mau merebut tanah orang lain tanpa melihat bukti-bukti yang ada. Tokoh-tokoh masyarakat menganggap bahwa perempuan yang berjuang untuk merebut kembali haknya adalah perempuan yang *bejat* (perempuan yang amoral), juga dikatakan sebaga "Gerwani" dan sebagai "pelacur". Tokoh-tokoh agama yang ada di Nogosari menganggap perjuangan perempuan

¹ Wawancara, Ibu Bakri, Gumuk Bago, tanggal 16 Maret 2006

untuk merebut tanah dari PG. Semboro PTPN XI adalah perjuangan yang diharamkan dan tidak boleh diikuti apalagi untuk mendukung, itu adalah hal yang dilarang, para tokoh agama ini menggunakan nilai-nilai yang ada dalam agama sebagai tameng untuk melunturkan semangat kaum perempuan untuk meminta kembali haknya.² Masyarakat Nogosari yang bukan ahli waris sama sekali tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan kaum perempuan untuk merebut kembali haknya, ini juga membuat mereka tertekan karena secara pergaulan sosial di masyarakat dikucilkan dan diremehkan. Kaum perempuan yang berjuang ini selalu menjadi bahan isu yang menarik. Masyarakat Nogosari yang bukan ahli waris menganggap bahwa apa yang dilakukan kaum perempuan mengganggu tatanan dan ketentraman yang sudah ada.

Tatanan yang dibangun masyarakat Nogosari yang sudah ada adalah tatanan masyarakat yang sangat berpihak pada laki-laki dan menganggap bahwa perempuan tidak tahu apa-apa, dan menilai perempuan berada "di dapur, kasur, dan sumur".³ Sehingga ketika ada perempuan yang berani memperjuangkan hak-haknya dianggap sebagai perempuan yang "tidak baik" dan melanggar adat juga etika dalam masyarakat.

² Wawancara, Bapak Munir, Gumuk Limo, tanggal 16 Maret 2006

³ Di dapur, kasur dan sumur adalah istilah dalam masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan adalah di dapur, kasur, dan sumur. Dalam masyarakat yang berkebudayaan Jawa, Madura ataupun Pendalungan menganggap bahwa pekerjaan perempuan tidak lebih dari di dapur untuk memasak, di kasur untuk melayani suaminya dan di sumur untuk bersih-bersih.

3.2.1 Tokoh Formal

Peranan tokoh formal yang tidak mendukung dalam perjuangan petani di Nogosari menyebabkan terjadinya kegagalan dalam aksi protes yang dilakukan oleh kaum perempuan. Penyebab kegagalan yang lainnya karena aksi protes yang dilakukan kaum perempuan tidak terencana, hanya reaksi spontan dengan melihat keadaan yang terjadi di wilayah Nogosari. Tidak terkoordinasinya aksi protes kaum perempuan yang ada di Nogosari, karena pada mulanya hanya mengandalkan ahli waris yang laki-laki, peranan perempuan tidak pernah dipertimbangkan.

Intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Kepala desa diuntungkan dengan adanya sengketa tanah yang ada di Nogosari karena tiap tahun kepala desa mendapat bagian 10 hektar ladang tebu dari PG. Semboro PTPN XI, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi.⁴ Bentuk intimidasinya yaitu dengan menakut-nakuti ahli waris yang menentang akan bernasib sama dengan temannya yang dipenjara.

3.2.2 Tokoh Informal

Tidak adanya dukungan dari masyarakat selain ahli waris kasus tanah yang ada di Nogosari juga menjadi factor penyebab lain dari kegagalan aksi protes yang dilakukan kaum perempuan, juga dukungan dari pihak luar daerah Nogosari tidak ada dalam gerakan kaum perempuan. Banyaknya tokoh kaum perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis adalah hal yang sangat

⁴ Wawancara, Bapak Munir, Gumuk Limo, tanggal 16 Maret 2006

merugikan bagi perjuangan karena pihak PG. Semboro PTPN XI selalu mengancam dengan menggunakan undang-undang yang berlaku padahal ancaman itu bisa dipatahkan dengan argument tentang hukum juga.

Koordinasi antara ahli waris perjuangan kasus tanah yang ada di Nogosari menjadi sangat penting, karena dengan bersatunya suara ahli waris menuntut kembali tanahnya adalah kunci yang utama selain bukti-bukti yang dimiliki oleh ahli waris.

Tokoh agama dan masyarakat tidak mendukung dalam perjuangan-perjuangan petani kasus yang ada di Nogosari ini terbukti dengan masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan tanahnya kembali dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dan dijauhi untuk dating ke pengajian, ahli waris menjadi bahan pembicaraan. Secara tidak langsung ahli waris tidak dilarang untuk ikut pengajian tetapi dengan jadi bahan pembicaraan itu merupakan larangan tidak langsung yang diterapkan oleh para tokoh agama yang ada di Nogosari.

3.3 Reaksi Spontan Kaum Perempuan

3.3.1 Muncul Karena Ketertindasan

Dalam membahas aksi protes yang dilakukan kaum perempuan Nogosari perlu beberapa analisa yang menjadi penyebab pokok dalam aksi sosial ini. Radikalisasi yang terjadi pada kaum perempuan Nogosari kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember merupakan fenomena perlawanan atau protes yang muncul dalam masyarakat pedesaan. Sebagai acuan analisis dalam menjelaskan dimensi aksi protes kaum perempuan digunakan acuan studi tentang pola-pola gerakan perlawanan kaum perempuan dalam kasus tanah.

Belum banyaknya kajian yang membahas aksi protes kaum perempuan dalam kasus tanah, cukup menyulitkan penulis untuk membuat acuan dalam pola-pola perlawanan. Dalam organisasi konsorsium pembaruan agraria (KPA) pembahasan tentang aksi protes perempuan dalam masalah agraria menjadi bahasan dan kajian yang terus dikembangkan. Selama ini yang selalu menjadi acuan adalah gerakan petani pedesaan yang sudah cukup banyak mengkaji tentang gerakan petani dalam kasus tanah yang ada.⁵

Kondisi yang ada di Nogosari dengan tidak adanya dukungan dari tokoh formal dan informal yang ada di Desa Nogosari merupakan tekanan yang berat untuk kaum perempuan dan ahli waris kasus tanah yang ada di Nogosari. Pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terlibat kasus tanah merupakan hal sangat berat yang harus diterima ahli waris terutama kaum perempuan, karena kaum perempuan pedesaan lebih banyak berinteraksi dan bergaul dengan tetangga di sekitarnya.

Dalam perlawanan kaum perempuan yang ada di Nogosari ideologi yang digunakan adalah suatu keyakinan bahwa tanah itu adalah milik nenek moyang ahli waris yang ada di Nogosari dan harus dipertahankan sampai mati. Prinsip lain yang dianut oleh kaum perempuan di Nogosari, karena tanah adalah "ibu" yang memberikan kehidupan untuk kelangsungan hidup petani. Bila petani tidak memiliki tanah maka dia akan mati, karena sumber penghidupannya diambil dan belum dikembalikan oleh Negara.

⁵ Konsorsium Pembaharuan Agraria, Usulan ketetapan MPR Republik Indonesia. (Bandung:Konsorsium Pembararuan Agraria, 2000), hlm. 97

Kondisi yang menyebabkan kaum perempuan berani melawan adalah malu, karena selama ini kaum perempuan yang ahli waris selalu dianggap sebagai orang yang tidak tahu aturan dan adat, ibu Op selalu bilang "saya ini sudah kemaluan, harta saya habis, saya jadi pembicaraan orang yang tidak enak (saya sudah merasa sangat malu, harta saya habis, saya jadi bahan pembicaraan orang yang tidak menyenangkan, harta saya habis), *Angoan poteya tolang etembang poteya mata*.⁶ Kami kaum perempuan dan seluruh masyarakat yang mempunyai tanah di Nogosari ini harus berjuang sampai tanah itu kami dapatkan kembali.⁷ Kaum perempuan ahli waris di Nogosari, meyakini kalau tanah itu miliknya. Maka kaum perempuan di Nogosari berjuang untuk mempertahankan tanah yang sekarang digarap untuk perkebunan tebu oleh PG. Semboro PTPN XI dan hak guna usaha (HGU) berakhir pada tahun 2007.

Saat ini petani miskin yang tidak mempunyai lahan relative kekurangan pangan dan miskin dibandingkan dengan petani yang memiliki tanah, karena dari tanah itu ada hasil yang didapatkannya maka petani tidak kekurangan makan. Kemiskinan yang terjadi di Nogosari juga disebabkan oleh tanah yang seharusnya ahli waris garap dan merasakan hasilnya yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tapi itu tidak terjadi. Ahli waris harus bekerja seadanya, sekolah juga tidak mampu untuk membiayai sedangkan kebanyakan ahli waris tidak memiliki keahlian lain, selain bertani.

⁶ Peribahasa dalam bahasa Madura yang artinya lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Peribahasa ini sering digunakan untuk hal-hal yang dianggap malu oleh orang Madura, misalnya tanah yang diambil oleh pihak lain, dan penyelesaiannya sangat mungkin dengan jalan kekerasan.

⁷ Wawancara, Ibu Op, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

3.3.2 Bentuk Perlawanan

Melihat perlawanan kaum perempuan Nogosari dengan langsung melihat fenomena yang terjadi. Karena kajian tentang perlawanan kaum perempuan masih sangat langka, maka penulis mencoba menuliskan pola-pola perlawanan kaum perempuan Nogosari.

Berbagai argumen tentang perlawanan petani yang berbasis di wilayah lokal merupakan acuan yang ada dan menjadi landasan untuk penulisan selanjutnya. Landasan dalam gerakan perempuan di Nogosari itu belum ditemukan tapi setidaknya itu mendekati dari pola-pola yang dibangun kaum perempuan ahli waris tanah Nogosari untuk mendapatkan haknya kembali.

Kesadaran yang muncul pada kaum perempuan Nogosari untuk berjuang mengambil kembali haknya yang selama ini tidak diberikan oleh Negara, yaitu berupa tanah yang dikelola PG. Semboro PTPN XI, membuat semangat perlawanan terus berkobar dan akan hilang ketika ajal menjemput.⁸ Di pihak lain yang menumbuhkan kesadaran adalah runtuhnya rezim Orde Baru, yang runtuh pada tahun 1998. Tumbangnya Orde Baru merupakan faktor eksternal yang ada dalam perlawanan masyarakat. Selain itu pernyataan Gus Dur pada tahun 2001 yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh perkebunan Negara 40% adalah milik masyarakat dan harus segera dikembalikan kepada ahli warisnya.

Dari dasar aksi protes ini kita lihat sejauh mana intensitas aksi protes yang dilakukan oleh kaum perempuan yang ada di Nogosari untuk melakukan aksi-aksi perlawanan yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana kekuatan dari organisasi

⁸ Wawancara, Ibu Op, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

dan perlawanan kaum perempuan, juga sejauh mana keterlibatan kaum perempuan dalam perjuangan merebut kembali tanah yang ada di Nogosari.

Kaum perempuan dalam wilayah konflik agraria memiliki tingkat kebersamaan yang sangat tinggi, kerana petani yang berkasus mempunyai permasalahan yang sama. Seringnya kelompok laki-laki berkumpul tidak membuat kaum perempuan Nogosari tidak ketinggalan informasi untuk perkembangan kasus tanah, secara formal kaum perempuan di Nogosari memang jarang berkumpul tetapi berkumpul sering dilakukan di belakangan atau di dapur sambil mendengarkan pembicaraan yang dilakukan oleh kelompok laki-lakinya. Informasi untuk perkembangan kasus tanah di Nogosari menyebar dengan sangat cepat, di Nogosari ini media cetak kalah cepat dengan berita yang disebar dari mulut ke mulut, dalam satu detik bisa memberi tahu beberapa orang.⁹

Ahli waris yang bekerja jadi buruh tani, bertemu di lahan, pertemuan ini dimanfaatkan untuk bercakap-cakap tentang kondisi kasus tanah yang sedang dihadapi. Ketika *reformasi* terjadi tahun 1998, kaum perempuan juga ikut dalam demonstrasi-demonstrasi,¹⁰ untuk meminta kembali haknya yang dilakukan oleh seluruh ahli waris.

Bentuk perlawanan yang dilakukan ahli waris dengan dua cara yaitu dengan cara *litigasi* (jalur hukum) dan *non litigasi* (bukan jalur hukum). *Litigasi* ditempuh dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada nialnya kerawangan (sejarah tentang asal-usul desa dan kepemilikan tanah sejak jaman Belanda) yang ada

⁹ Wawancara, Ibu Sanah, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

¹⁰ Demonstrasi adalah protes yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada kelompok lain, dengan cara turun ke lapangan.

di desa, peta lokasi tanah yang disengketakan, surat bukti pajak pada tahun 1948, dan surat bukti kepemilikan tanah dan *petok*, dikumpulkan kemudian diserahkan untuk diketahui oleh beberapa instansi pemerintah yang berwenang untuk kasus sengketa tanah yang ada di Nogosari. Surat itu dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), anggota DPR komisi II dan III, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ketua Pengadilan Negeri, Gubernur Jawa Timur, kapolda Jawa Timur, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, Direksi PTPN XI Surabaya, Kapolwil Besuki di Bondowoso, Bapak Bupati Kabupaten Jember, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ketua Pengadilan Negeri Jember, Kapolres Jember, Muspika Rambipuji, dan Kepala Desa Nogosari.

Jalur non *litigasi* ditempuh dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi di wilayah yang dianggap strategis untuk menekan pemerintah agar membatalkan HAK Guna Usaha (HGU) yang masih berlaku sampai dengan tahun 2007. Ahli waris melakukan demonstrasi di instansi pemerintah yang berhubungan dengan masalah kasus tanah, misalnya Pengadilan Negeri Jember, Kantor BPN, Kantor DPRD II, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Kantor Polres Jember, Kantor Pusat Penelitian Kakao (Puslit Kakao) dan Kantor PG. Semboro PTPN XI yang ada di Desa Nogosari.

Demonstrasi pertama dilakukan oleh ahli waris pada Kamis 27 April 2000, warga datang ke Puslit kakao untuk meminta tanah yang dikuasai oleh Puslit kakao, demonstrasi ini dipimpin oleh Arif Kelana dan Suwarno.¹¹ Demonstrasi itu awalan sebelum

¹¹ Radar Jember, Kamis, 27 April 2000

melakukan demonstrasi-demonstrasi lanjutan untuk menuntut tanah yang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI. Pada Kamis, 5 April 2001 demonstrasi dilakukan di BPN Jember, warga menuntut HGU 338,655 Ha lahan tebu yang dikelola oleh PG. Semboro PTPN XI untuk segera dicabut karena menguasai tanah milik ahli waris di Nogosari, demonstrasi ini dipimpin oleh Musa dan Bakri.¹²

Ahli waris yang ikut berdemonstrasi cukup banyak. Demonstrasi pada tanggal 5 April tahun 2001 di BPN diikuti oleh 700 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Semangat ini muncul karena adanya kesadaran bahwa tanah itu adalah milik warga Desa Nogosari yang ahli waris tanah itu. Pertemuan dilakukan oleh ahli waris hampir tiap hari untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena sering demonstrasi yang dilakukan ahli waris ke kantor PG. Semboro yang ada di Desa Nogosari membuat penjagaan yang dilakukan oleh Polres diperketat. Desa Nogosari seketika menjadi sangat mencekam karena aparat keamanan dari Polres berjaga-jaga di setiap sudut jalan. Aksi dilakukan dengan merusak kantor PG. Semboro yang ada di Nogosari sehingga banyak ahli waris yang ditangkap. Sepinya suasana dan banyaknya kawan seperjuangan yang ditangkap tidak membuat ahli waris mundur, karena kaum laki-laknya banyak yang keluar dari Desa Nogosari maka kaum perempuan yang tetap bertahan dan menerima berbagai ancaman dari pihak PG. Semboro PTPN XI, misalnya kalau ada yang melawan maka akan ditelanjangi di

¹² Surabaya Pos, Kamis, 5 April 2001

depan Publik.¹³ Bagi perempuan telanjang di depan publik berarti dia memiliki dosa yang memalukan misalnya *zina* (melakukan hal yang tidak senonoh dengan selain suami atau istrinya). Berbagai ancaman yang dilakukan oleh pihak PG. Semboro PTPN XI tidak dipedulikan oleh kaum perempuan ahli waris.

Kaum perempuan tetap melakukan aktifitas biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa, mengelola lahan tanah sengketa kemudian ditanami dengan berbagai tanaman palawija. Pertemuan antar ahli waris sering dilakukan terutama yang perempuan hampir tiap jam berjaga-jaga untuk mencari kabar tentang tokoh-tokoh yang ditangkap oleh polisi.

Tanggal 24 Mei 2001 pegawai PG. Semboro PTPN XI yang mengendarai mobil jip terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki, yaitu Ana, Dewi dan Andi, yang hendak membersihkan puing-puing kantor milik PTPN XI yang ada di Desa Nogosari. Saat melewati Dusun Gumuk Bago mereka dicegat dan ditangkap oleh kaum perempuan dan anak-anak ahli waris tanah yang ada di Nogosari. Warga sebelumnya sudah mendengar akan ada pegawai PG. Semboro, yang akan membersihkan kantor milik PTPN XI yang bertempat di Desa Nogosari. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ahli waris perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata untuk menyandera pegawai PG. Semboro PTPN XI. Sebagai jaminan agar kawan-kawan mereka yang ditangkap segera dibebaskan oleh aparat keamanan yaitu Polres Jember. Aksi ini dipimpin oleh Ibu Op, Ibu Bakri, dan Ibu Sanah, yang semuanya berasal dari Dusun Gumuk Bago.

Penyanderaan dilakukan dari jam 08.00 WIB sampai jam 18.30 WIB. Tiga orang sandera diperlakukan dengan baik oleh ahli waris tapi karena tiga orang sandera itu ketakutan, dia tidak mau

¹³ Wawancara, Ibu Bakri, Gumuk Bago, tanggal 16 Maret 2006

makan atau melakukan apapun hanya menangis. Tiga orang sandera ditempatkan di salah satu rumah ahli waris yaitu rumah Dul. Jam 12.00 WIB aparat keamanan dari Polres Jember datang sebanyak dua pleton, tetapi aparat keamanan dihadang oleh masa dari ahli waris di Gumuk Bago, sehingga aparat keamanan tidak bisa masuk lebih jauh ke Desa Nogosari. Sampai sore harinya massa masih menyandera pegawai PG. Semboro PTPN XI. Keinginan massa ahli waris yang dipimpin oleh Ibu Op, Ibu Bakri, dan Ibu Sanah adalah menukar tiga orang sandera dengan kawan-kawan yang ditangkap oleh aparat keamanan. Sampai pukul 16.00 WIB aparat belum bisa membebaskan tiga orang yang disandera, karena belum ada kesepakatan antara pemimpin ahli waris yang menyandera, dengan pegawai PG. Semboro PTPN XI, pihak keamanan dari Polsek Rambipuji dan Kepala Desa Nogosari (Bapak Slamet).

Aparat keamanan melakukan lobi-lobi dengan pemimpin, walaupun kaum perempuan tidak bersenjata tajam tetapi masa yang sangat banyak semangat keberanian ahli waris muncul, dan merasa bahwa kawannya sedang merasakan penderitaan di tahanan, ahli waris yang terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak berani melakukan penyanderaan.

Jam 16.00 WIB ada pembicaraan antara masa pemimpin ahli waris yang diwakili oleh Ibu Op, Ibu Bakri, Ibu Sanah, aparat keamanan dari Polres Kabupaten Jember, Perangkat Desa Nogosari dan perwakilan dari PG. Semboro PTPN XI, isi pembicaraan itu adalah bagaimana caranya supaya aparat keamanan bisa menukar sandera dengan kawan-kawan mereka yang ditangkap. Sampai pukul 17.00 WIB belum ada kesepakatan dan titik temu antara perwakilan dari ahli waris dan pihak PG. Semboro PTPN XI, karena pihak PG. Semboro tidak mau mencabut

tuntutannya sehingga aparat keamanan tidak bisa melepaskan ahli waris yang ditangkap.

Perundingan menjadi panas karena belum adanya titik temu. Perundingan diakhiri dengan keluarnya perwakilan ahli waris dan bergabung dengan kawan-kawannya. Sampai pukul 17.15 WIB aparat melakukan tembakan peringatan untuk bisa membubarkan masa yang menutupi jalan menuju ke arah tempat tiga orang yang disandera tetapi massa tetap diam di tempat. Aparat keamanan dari Polsek Rambipuji dan Polres Jember menambah personil aparat keamanan untuk bisa menghalau massa yang menghalangi. Akhirnya kekerasanpun terjadi, masa yang menghalangi jalan dengan aparat keamanan, kemudian aparat keamanan maju dan melakukan kekerasan dengan memukul masa yang ada di depan sehingga massa menjadi tercerai berai, dan aparat keamanan melakukan beberapa kali tembakan di udara. Massa banyak yang terluka oleh tendangan dan pukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan menggunakan belakang senapan (popor senapan).¹⁴

Tembakan ke udara dibalas oleh anak-anak yang bersenjata ketapel (mainan yang biasa digunakan oleh anak-anak dengan isinya berupa batu kecil-kecil), mengarahkan ketapelnya ke arah aparat keamanan, dengan bersembunyi dibalik pohon dan diatas gumuk. Banyaknya tembakan yang ditembakkan oleh aparat keamanan, membuat Desa Nogosari semakin mencekam karena warga yang bukan ahli waris tidak berani keluar dari rumah. Sampai pukul 18.30 WIB sandera baru bisa dilepaskan oleh massa ahli waris. Massa ahli waris yang masih tersisa dikumpulkan dan diancam akan ditangkap. Malam itu

¹⁴ Wawancara, Ibu Sanah, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

suasana Desa Nogosari mencekam dan aparat keamanan berjaga-jaga di sepanjang jalan Desa Nogosari.¹⁵

Aksi protes yang dilakukan kaum perempuan yang ada di Desa Nogosari baru terlihat kepemimpinan dan keberanian kaum perempuan, karena selama perjuangan berlangsung selalu dipimpin oleh ahli waris yang laki-laki. Aksi protes ini muncul ketika para pemimpin ahli waris kasus tanah y\banyak yang ditangkap, kaum perempuan mampu menggantikan posisi kepemimpinan laki-laki. Kaum perempuan yang memimpin perjuangan menggantikan pemimpin laki-laki, walaupun dari segi pendidikan mereka tidak pernah bersekolah secara formal, kaum perempuan ini juga banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. kaum perempuan ahli waris mendasarkan pada keyakinan bahwa tanah yang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI adalah milik nenek moyang mereka dan harus segera direbut kembali untuk kesejahteraan bersama.

Semangat kebersamaan yang dibangun antara sesama ahli waris sangat kuat dalam perjuangan kaum perempuan di Nogosari. Kaum perempuan dalam menggantikan kepemimpinan sementara selama para pemimpin dipenjara melakukan rapat-rapat antara sesama ahli waris. Hasil dari rapat itu juga tidak lupa disampaikan kepada para tokoh yang sedang dalam tahanan dengan cara membesuk tahanan dan meyampaikan perkembangan yang sedang terjadi di Nogosari.

Kepemimpinan aksi protes yang dilakukan kaum perempuan kasus tanah di Nogosari setelah Bakri ditangkap dipercayakan kepada kaum perempuan yang dipimn oleh Ibu Op, Ibu Sanah dan Ibu Bakri. Setiap dusun tidak ada perwakilan untuk memimpin dalam aksi protes yang dilakukan kaum perempuan

¹⁵ Wawancara, Ibu Op, Gunuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

ini. Untuk koordinasi para ahli waris melakukan dengan cara kumpul di salah satu rumah ahli waris yang dipercaya.

Perempuan dalam aksi protes di Nogosari, menggantikan posisi para tokoh ahli waris yang ditangkap. Bakri dikeluarkan tanggal 6 Juni 2002. Bakri terlebih dahulu dikeluarkan dari penjara oleh Polres Jember dengan alasan sakit parah, yang lainnya masih tinggal di penjara. Setelah keluar dari penjara, Bakri yang merupakan tokoh perjuangan ahli waris kasus tanah di Nogosari sempat tinggal di rumahnya selama satu minggu sebelum akhirnya meninggal dunia dengan luka dan sebam diseluruh tubuhnya.¹⁶

3.3.3 Budaya Pandalungan Sebagai Penghambat Munculnya Kepemimpinan Kaum Perempuan

Pada masa Orde Baru selalu didengung-dengungkan bahwa ibu atau perempuan yang baik adalah menurut pada apa yang dikatakan suami atau ayahnya tentang berbagai hal dan perempuan tidak boleh berorganisasi selain organisasi yang telah ditentukan pemerintah. Pegawai negeri untuk organisasi yang diakui adalah Dharma wanita. Untuk istri militer organisasi yang diperbolehkan adalah dharma pertiwi, dan untuk ibu-ibu yang tidak masuk dalam kedua unsure itu dimasukkan dalam organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam budaya pertanian peran perempuan sangat penting dari mulai memilih benih untuk ditanah, proses penanaman, menyiangi rumput, sampai pada panen sampai dengan pasca panen, tetapi untuk pengambilan kebijakan untuk jenis tanaman apa atau untuk menjual hasil perempuan tidak dilibatkan dan

¹⁶ Wawancara, Ibu Bakri, Gumuk Bago, tanggal 16 Maret 2005

hanya tahu hasilnya untung atau rugi. Budaya agraris juga sangat mementingkan perempuan untuk terlibat dalam hal pertanian, tetapi untuk hal-hal lain misalnya etika dan kesopanan perempuan sangat dibatasi.

Perempuan yang “baik” adalah perempuan yang tidak banyak tingkah dan tidak macam-macam apalagi perempuan yang kritis itu dilarang karena kalau perempuan kritis maka tidak baik dan dibilang cerewet, sampai saat ini hal-hal seperti diatas masih terus dikembangkan dan menjadi pegangan untuk mengatur etika perempuan di dalam masyarakat. Ketika ada perempuan yang melakukan hal yang lain dari perempuan ditempatnya maka dia terasing dan akan dijauhi oleh masyarakat disekitar rumahnya.

Masyarakat selama ini hanya mengenal dan boleh mengikuti organisasi yang disediakan pemerintah dan tidak boleh ikut dalam organisasi apapun selain yang telah ditentukan. Maka ketika kaum perempuan Nogosari membentuk kelompok untuk kepentingan perjuangan, tanggapan yang didapatkan adalah cemoohan dan ejekan serta cap Gerwani juga melekat pada kaum perempuan ahli waris dari tanah yang ada di Nogosari.

Masa sebelum 1965 ada organisasi non pemerintah yang bernama Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), gerakan ini berjuang untuk kesetaraan dalam politik antara perempuan dan laki-laki, untuk hanya dalam bidang politik tapi juga dalam bidang sosial, pendidikan dan budaya, tetapi Orde Baru menuduh Gerwani terlibat dalam gerakan *kudeta*,¹⁷ yang dilakukan oleh

¹⁷ Kudeta, terjadi dari infiltrasi kedalam suatu segmen apparatus Negara yang terkecil tetapi menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambil alih pemerintah dari kendali unsur-unsur lainnya *Kudeta*, tidak harus dibantu oleh intervensi massa atau kekuatan senjata yang besar. Edwar luttwat, *Kudeta*, (Yogyakarta: yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm. 21-22

Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga imbas yang terjadi pada gerakan ini adalah organisasi perempuan dilarang karena dianggap “liar” dan tidak “keibuan”. Sejarah itu selalu didengungkan dan selalu diberikan kepada kaum perempuan yang berusaha untuk meluruskan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Orde Baru memberikan *stigma* negatif bahwa Gerwani, adalah organisasi yang kejam dan ikut serta dalam pembunuhan Jendral, dan masuk dalam organisasi masyarakat yang tergabung dan merupakan onderbow dari PKI.¹⁸

Kaum perempuan yang berusaha bangkit dari keterpurukan keadaan, akan dicap buruk dan dijauhi oleh masyarakat. Begitupun dengan kaum perempuan Nogosari ketika melakukan perlawanan untuk mendukung perjuangan yang dilakukan oleh organisasi petani ahli waris kasus tanah. Dalam masyarakat Pedalungan kaum perempuan yang berani melakukan perlawanan dia akan dianggap sebagai “mahluk yang aneh”, karena dalam kebudayaan pedalungan tidak mengenal perempuan yang meleakukan perlawanan pihak lain apalagi terhadap aparat keamanan dan pemerintah. Jiki dia melakukan hal itu maka dia dianggap sebagai pembangkang, walaupun perlawanannya tidak menggunakan senjata tajam ataupun benda-benda lainnya yang membahayakan.

Secara obyektif-struktural, di wilayah Tapal Kuda tersebar sumber daya alam yang potensial memproduksi konflik. Di Wilayah pedalaman terdapat lahan produktif yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti perkebunan atau pertanian dan

¹⁸ Saskia, Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Kalianamitra, 1998), hlm. 56

.....19



Jember merupakan daerah yang memadukan dua unsure kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yaitu Kebudayaan Madura dan Kebudayaan Jawa yang biasa disebut dengan Kebudayaan Pendalungan. dalam kebudayaan Madura perempuan merupakan pekerja keras karena kondisi alam yang mengharuskan untuk jadi pekerja keras. Tetapi dalam kebudayaan Madura tidak banyak memberikan peluang untuk perempuan dalam melakukan aktifitas diluar wilayah pertanian.

3.4 Dampak Terhadap Aksi Protes

Dalam melakukan aksi protes kaum perempuan di Nogosari, banyak menimbulkan dampak baik positif ataupun dampak negatif. Dampak negatif dirasakan kaum perempuan ahli waris dengan banyaknya hinaan yang muncul dari masyarakat yang tidak ikut dalam sengketa tanah. Tapi dibalik dampak negatif juga ada dampak positif yaitu makin menguatkan persatuan antara ahli waris karena adanya kesamaan nasib yang makin dalam.

Dampak lain dirasakan dibedakan menjadi dua yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial yang langsung dirasakan kaum perempuan ahli waris tanah yang ada di wilayah Nogosari.

3.4.1 Dampak Ekonomi

Masyarakat Nogosari sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Desa Nogosari merupakan daerah yang subur untuk pertanian, jenis tanamannyapun beragam dan bisa tumbuh dengan baik. Padi dan tembakau merupakan tanaman yang selalu ditanam tiap tahunnya oleh peteni Nogosari. Kebutuhan tenaga kerja untuk

pertanian diambil dari masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani.

Dampak yang dirasakan kaum perempuan Nogosari dalam perjuangan untuk menuntut haknya secara ekonomi adalah kebanyakan para pemilik tanah tidak mau menggunakan jasa kaum perempuan ahli waris untuk mengelola lahannya, orang-orang yang memiliki tanah lebih memilih orang lain atau orang dari desa lain kalau tidak ada lagi yang dipekerjakan. Alasannya dari pemilik lahan sangat beragam ada yang tidak mau mempekerjakan karena takut dituduh sebagai pendukung dari perjuangan kasus tanah yang ada di Nogosari. Pemilik tanah yang tidak mempekerjakan ahli waris pemilik tanah di Nogosari ada yang beralasan bahwa ada kekhawatiran ahli waris yang perempuan akan minta hal yang macam-macam.

Kaum perempuan ahli waris yang ikut perjuangan dalam merebut tanah dari PG. Semboro PTPN XI. Akses-akses ekonominya dikesampingkan, misalnya dalam bidang perdagangan, orang akan lebih memilih membeli di tempat lain yang lebih jauh dan lebih mahal dari pada harus membeli sesuatu di tempat berjualnya ahli waris.²⁰

Penghidupan yang tidak menjanjikan untuk kaum perempuan ahli waris membuat perempuan tidak punya pilihan untuk bekerja di daerahnya, permasalahannya adalah kaum perempuan ahli waris banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal sehingga banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Menikah pada usia muda juga menjadi fenomena yang ada di Nogosari, anak perempuan usia 12 tahun akan segera dinikahkan oleh orang tuanya karena takut jadi perawan tua dan tidak laku.

²⁰ Wawancara, ibu OP, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

Larangan untuk mempekerjakan kaum perempuan ahli waris untuk mengerjakan lahan dikeluarkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk seluruh masyarakat Nogosari. Kondisi ini membuat kaum perempuan ahli waris Nogosari sangat terpuruk dalam hal ekonomi karena kaum perempuan ahli waris kebanyakan tidak punya keahlian dibidang lain, selain sebagai buruh tani dan membuat *welit*.

Pandangan dari para tokoh yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan ahli waris sangat merugikan dan diskriminasi. Sehingga membuat kaum perempuan ahli waris Nogosari yang semula miskin jadi tambah miskin dan tidak punya banyak akses dalam bidang ekonomi.

Dampak ekonomi yang diakibatkan dari penyanderaan yang dilakukan kaum perempuan ahli waris di Nogosari adalah, PG. Semboro tidak mau lagi mempekerjakan orang-orang Nogosari baik ahli waris ataupun bukan ahli waris kecuali dipekerjakan sebagai penjaga kebun. Tenaga kerja diambil dari luar Desa Nogosari, kecuali pekerjaan sebagai *centeng* (penjaga kebun tebu) diambil dari Nogosari karena dianggap strategis. *Centeng* juga ditugasi untuk memata-matai aktifitas ahli waris. Strategi itu digunakan PG. semboro PTPN XI untuk mengadu domba antara ahli waris dan yang bukan ahli waris. Para *centeng* tidak segan-segan untuk mengancam akan memukul warga yang bergerombol dan tidak diketahui keperluannya apa. Patrol polisi juga sering dilakukan untuk mengantisipasi jika ada sesuatu.

Saat penebangan tebu pekerja dijaga oleh *centeng* dan polisi, dan lahan yang kosong selalu dijaga. Kekhawatiran PG. semboro adalah peristiwa tahun 2001 terulang kembali, yaitu pendudukan lahan yang dilakukan oleh ahli waris.

Reaksi apapun yang dilakukan PG. semboro PTPN XI tidak pernah membuat masyarakat ahli waris menyerah untuk merebut kembali lahan itu karena bagi mereka miskin itu sudah dari dulu dan memang dari dulu sejak tahu tanah itu adalah miliknya ahli waris yang tidak pernah terlibat dalam proses ataupun bekerja di PG. semboro PTPN XI. Kebijakan apapun tidak berpengaruh banyak, tetapi yang jadi ganjalan adalah terbatasnya ruang gerak ahli waris karena selalu diawasi oleh *centeng* PG. Semboro, ini membuat hubungan bermasyarakat jadi rengang karena satu sama lain saling curiga.

3.4.2 Dampak Sosial

Aksi protes yang dilakukan kaum perempuan mempunyai dampak yang sangat luar biasa untuk pandangan masyarakat dalam melihat gerakan kasus tanah yang ada, karena selama ini aksi protes kaum perempuan tentang kasus tanah sangat jarang untuk dimunculkan dan dituliskan.

Dampak yang paling nampak adalah hilangnya akses sosial dalam masyarakat yaitu dalam masyarakat Desa Nogosari yang mempunyai keyakinan dan menganut agama yang kuat, proses untuk berkumpul dan mengenal dalam masyarakat dengan cara adanya pengajian yang dilakukan seminggu atau sebulan sekali oleh kaum perempuan dan laki-laki untuk bisa mengenal satu sama lain biasanya ada pengikat juga dengan memalkukan arisan berupa uang atau barang, acara ini juga untuk proses sosialisasi dalam masyarakat.

Ahli waris, dibatasi aksesnya untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang tidak memiliki kasus tanah dengan cara melarang atau tidak menghadiri hajatan yang dilakukan oleh ahli

waris. Diskriminasi ini dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Nogosari. Ini sangat menyakitkan tetapi hal ini juga konsekuensi yang harus diterima oleh ahli waris yang memperjuangkan haknya. Pengajian yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bukan ahli waris tidak pernah melinbatkan apalagi mengundang ahli waris kaum perempuan, masyarakat menganggap bahwa kaum perempuan yang ikut berjuang dalam perebutan kasus tanah adalah perempuan yang lebih rendah derajatnya daripada "Sampah Masyarakat" (orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang melanggar etika dan adat yang berlaku dalam masyarakat).²¹

Dampak lain yang dirasakan oleh kaum perempuan ahli waris kasus tanah yang ada di Nogosari adalah dikucilkan dari pergaulan sosial dalam masyarakat dan selalu jadi bahan olok-olok dan ejekan. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat jadi terputus karena masyarakat yang bukan ahli waris merasa tidak berkenan jika anaknya atau saudaranya mendapat jodoh perempuan ahli waris maka mereka akan mendapatkan tentangan dari seluruh keluarganya yang tidak berkonflik. Ibu Bakri, tidak mau anak gadisnya menikah dengan yang bukan ahli waris, karena khawatir akan jadi bahan pembicaraan yang tidak baik, berita yang buruk tentang ahli waris sangat cepat tersebar dan jadi bahan pembicaraan orang dan itu membuat malu keluarga.

Ini sangat ironis karena masyarakat membuat pandangan yang sangat vertical dan terjadi diskriminasi yang sangat besar terhadap kaum perempuan ahli waris kasus tanah yang ada di Nogosari. Tidak banyaknya pilihan dalam hal pekerjaan, jodoh,

²¹ Wawancara, ibu OP, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

teman untuk berbicara membuat kaum perempuan Nogosari memilih untuk selalu berkawan dan dekat dengan sesama ahli waris karena mereka merasa senasib.

Sebenarnya ahli waris ingin seperti dulu bisa berhubungan baik dengan tetangga dan bisa rukun, karena banyaknya kepentingan yang ada di Nogosari masalah tanah di Nogosari tidak cepat terselesaikan dan yang paling dirugikan adalah semua ahli waris terutama yang kaum perempuan karena stigma yang buruk itu tidak akan lepas sampai mereka mati.

